

STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA SUKABUMI

Novita Sulastri Ningsih¹, Tuah Nur², Dine Meigawati³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi,
Jawa Barat, Indonesia

*Korespondensi : nvyta.ning18@gmail.com

ABSTRAK

Kota Sukabumi telah memperoleh opini WTP sebanyak 7 kali berturut-turut dimulai dari tahun 2014-2021. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui apa strategi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi sehingga meraih opini WTP 7 kali secara berturut – turut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik dengan mengeluarkan kebijakan, memberikan inovasi seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dapat diakses oleh seluruh SKPD Kota Sukabumi. Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) juga memudahkan dalam proses perencanaan pengadaan. Untuk laporan pertanggungjawabannya dapat dilihat pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan juga transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi telah dilakukan dengan baik sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Kata Kunci : Opini WTP, Pengelolaan Keuangan, Strategi

ABSTRACT

Sukabumi City has received WTP opinion 7 times in a row starting from 2014-2021. The purpose of this study is to find out what the strategy is carried out by the Regional Revenue and Financial Management Agency (BPKPD) of Sukabumi City so that it gets the WTP opinion 7 times in a row. The research method used in this research is qualitative. As for the results of the study, it shows that the financial management strategy at the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Sukabumi City has been going well by issuing policies, providing innovations such as the Regional Financial Management Information System (SIPKD) which can be accessed by all SKPDs of Sukabumi City. The General Procurement Plan Information System (SIRUP) application also facilitates the procurement planning process. The accountability report can be seen in the local government financial report (LKPD). Based on the research, it can be concluded that the financial management strategy has been running in accordance with the Government Accounting Standards (SAP) and also the transparency carried out by the Sukabumi City Government has been carried out well so that it gains the trust of the public.

Keyword : WTP Opinion, Financial Management, Strategy.

A. PENDAHULUAN

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya. Masyarakat harus mendapat pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban tersebut harus diungkapkan secara transparan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga masyarakat bisa benar-benar percaya kepada pemerintah.

Laporan keuangan juga merupakan indikasi pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya keuangan. Penyampaian laporan keuangan yang disajikan menjelaskan bahwa opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih tidak terlepas dari peran semua instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemerintah Kota Sukabumi.

Setiap tahun pemerintah daerah harus melaporkan pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan mendapat penilaian berupa opini. Dari *website* BPK RI disebutkan ada empat kriteria yang harus dipenuhi untuk meraih opini atas kewajaran informasi laporan keuangan sebagai berikut:

“(1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan, tidak ada ketentuan dilanggar. (4) adanya sistem pengendalian internal (SPI) dari kementerian”.

Dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2021 menjadi tahun emas untuk Kota Sukabumi karena telah dibuktikan dengan meraih opini WTP dari BPK RI. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Sukabumi telah mematuhi Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1.1 Opini LKPD Kota Sukabumi Tahun 2015-2021

Tahun	ragam Opini BPK RI			
	WTP	WDP	TW	TMP
2015	WTP	—	—	—
2016	WTP	—	—	—
2017	WTP	—	—	—
2018	WTP	—	—	—
2019	WTP	—	—	—
2020	WTP	—	—	—
2021	WTP	—	—	—

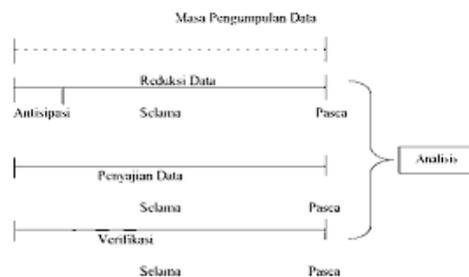
sumber: BPK RI, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sukabumi meraih opini WTP dari BPK RI selama 7 tahun secara berturut – turut dimulai dari tahun 2015 untuk tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2021 untuk tahun anggaran 2020. Sehingga dijadikan sebagai fokus masalah untuk mengetahui apa strategi yang dilakukan oleh BPKPD Kota Sukabumi dalam memperoleh opini WTP tersebut. Oleh karena itu berdasarkan uraian keberhasilan diatas, menjadi daya tarik peneliti untuk mengambil judul penelitian “Strategi Pengelolaan Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai “Strategi Pengelolaan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang dikemukakan oleh Creswell (2010:4).

Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data pada penelitian ini menurut Miles and Huberman dengan model alir berikut ini:



Gambar 1.1 Model Alir
Sumber: Sugiyono 2012:246

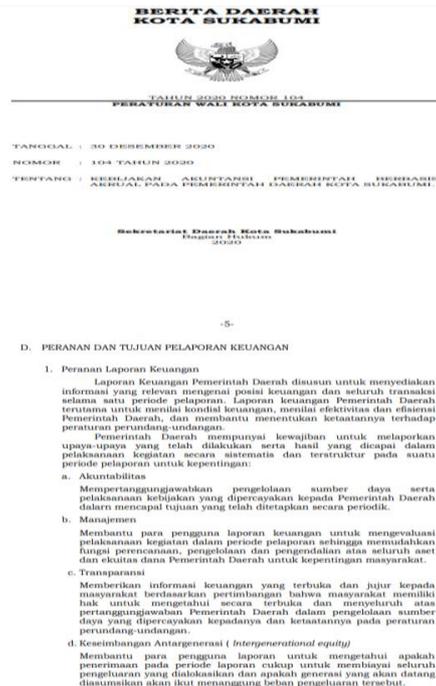
Kemudian dalam aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pada dasarnya merupakan suatu yang sangat vital dan dapat berpengaruh terhadap suatu keberhasilan dari rencana yang telah dibentuk. Seperti yang telah peneliti jelaskan pada latar belakang penelitian, bahwa pemerintah Kota Sukabumi telah mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) sehingga dapat memperoleh opini WTP sebanyak 7 kali berturut – turut dari BPK RI dimulai dari tahun 2015 untuk tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2021 untuk tahun

anggaran 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Sukabumi telah mematuhi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Karena dalam proses pengelolaan keuangan tidak terlepas dari peran Inspektorat Kota Sukabumi sebagai reviuer sehingga pada proses reviu dilaksanakan, reviu tetap mengacu pada kebijakan akuntansi yang dikeluarkan oleh BPKPD Kota Sukabumi. Mengenai proses transparansi BPKPD Kota Sukabumi telah melaksanakan sesuai dengan aturan – aturan yang telah ditetapkan seperti gambar berikut ini:



Gambar 1.2

Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Sumber: *Website* Pemerintah Kota Sukabumi.

Pada saat hasil audit diumumkan oleh BPK RI, BPKPD juga mengumumkan di *website* resmi pemerintah Kota Sukabumi.

KOTA SUKABUMI
 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	962.195.906.779
4.1.01	Pajak Daerah	57.368.584.880
4.1.02	Retribusi Daerah	7.968.631.300
4.1.03	Hasil Penghasilan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.037.833.800
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	298.860.877.627
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	807.622.451.213
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	727.497.271.981
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.155.079.232
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.381.962.800
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.381.962.800
	Jumlah Pendapatan	1.784.170.360.798
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.095.734.939.387
5.1.01	Beban Pegawai	540.067.540.000
5.1.02	Beban Barang dan Jasa	493.278.370.380
5.1.05	Beban Hibah	40.963.513.519
5.1.06	Beban Bantuan Sosial	5.335.300.000
5.2	BELANJA MODAL	106.156.164.111
5.2.01	Beban Modal Tanah	1.077.000.000
5.2.02	Beban Modal Perbaikan dan Meria	29.608.800.185
5.2.03	Beban Modal Gedung dan Bangunan	18.574.084.877

Pada *website* Pemerintah Kota Sukabumi laporan keuangan yang disajikan bukan merupakan laporan keuangan secara keseluruhan akan tetapi laporan keuangan seperti ringkasan APBD namun pada laporan keuangan lainnya seperti Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) merupakan keseluruhan dari laporan keuangan pada setiap SKPD yang ada di Kota Sukabumi tetapi pada RLPPD yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Sukabumi adalah yang belum diaudit oleh BPK RI karena laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi akan disampaikan tersendiri seperti pada gambar berikut yang merupakan hasil audit BPK RI yang diumumkan pada media cetak:

Gambar 1.4

Nercara LKPD Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2020 dan 2019
 Sumber: RadarSukabumi, 2021

Selain pada *website* atau media ceta masyarakat juga dapat mengakses di *website* resmi BPK RI.

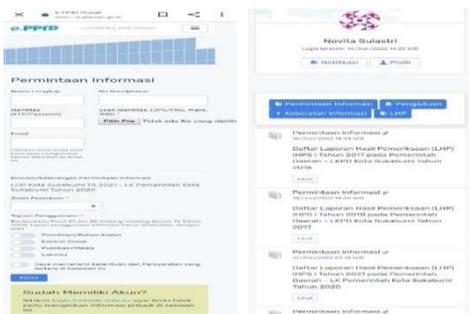
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

LHP PADA IHPs TAHUN 2021

SEMESTER I
 1. Daftar LHP Semester I Tahun 2021 pada Pemerintahan Pusat

SEMESTER II
 2. Daftar LHP Semester II Tahun 2021 pada Pemerintahan Pusat

Gambar 1.3
 Ringkasan APBD 2022 dan RLPPD 2021
 Sumber: Website Pemerintah Kota Sukabumi



Gambar 1.5
Website BPK RI
Sumber: BPK RI

Untuk mengakses laporan keuangan di *website* resmi BPK RI pemohon harus melakukan pendaftaran secara *online* agar dapat memiliki akun yang akan digunakan untuk memperoleh laporan keuangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Akun yang sudah didaftarkan akan mendapatkan verifikasi melalui email untuk kemudian dapat digunakan. Permohonan laporan keuangan akan di proses maksimal dalam 1x24 jam hari kerja selanjutnya laporan keuangan yang diberikan dapat diakses selama 14 hari akan tetapi laporan keuangan yang diberikan dapat di unduh atau di *download*.

Selanjutnya masih dalam bentuk transparansi yang dilakukan, BPKPD juga memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi melalui aplikasi SIRUP berikut ini:

No	Item/Spesifikasi	Uraian/Spesifikasi	Page/Qty	Metode Penawaran	Saluran Daya	Estimasi RP	Mula Penawaran
1	BALAI PESELENGKAWAN DAN PERENCANAAN SIBIKA	Penyediaan layanan SP/Perencanaan	1.000.000	Pengadaan Langsung	4951	1.000.000	Mei 2022
2	BALAI PESELENGKAWAN DAN PERENCANAAN SIBIKA	Penyediaan alat tulis	11.740.000	Pengadaan Langsung	4951	1.000.000	Mei 2022
3	BALAI PESELENGKAWAN DAN PERENCANAAN SIBIKA	Penyediaan layanan	8.075.000	Pengadaan Langsung	4951	1.000.000	Mei 2022
4	BALAI PESELENGKAWAN DAN PERENCANAAN SIBIKA	Penyediaan layanan	1.100.000	Pengadaan Langsung	4951	1.000.000	Mei 2022
5	BALAI PESELENGKAWAN DAN PERENCANAAN SIBIKA	Penyediaan layanan	30.000.000	Pengadaan Langsung	4951	1.000.000	Mei 2022
6	BALAI PESELENGKAWAN DAN PERENCANAAN SIBIKA	Penyediaan layanan	10.000.000	Pengadaan Langsung	4951	1.000.000	Mei 2022
7	BALAI PESELENGKAWAN DAN PERENCANAAN SIBIKA	Penyediaan layanan	100.000.000	Pengadaan Langsung	4951	1.000.000	Mei 2022

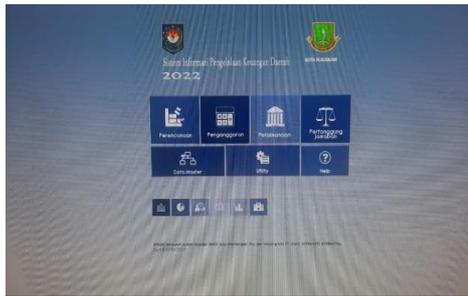
Gambar 1.6
Aplikasi SIRUP
Sumber: Website SIRUP

Pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau yang sering disebut dengan nama aplikasi SIRUP ini tidak hanya pemilik akun yang dapat mengakses atau mendapatkan manfaat dari fitur – fitur yang ada akan tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki akun juga dapat memanfaatkan fitur –fitur yang telah disediakan seperti rekap, cari paket, panduan, FAQ, berita dan *dashboard*.

BPKPD Kota Sukabumi juga memiliki sistem informasi dengan nama sistem Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah Kota Sukabumi. Sistem atau aplikasi tersebut telah digunakan mulai dari tahun 2013 sampai dengan saat ini tahun 2022.

Akan tetapi jaringan juga berperan penting dalam proses pengelolaan keuangan karena seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan tidak terlepas dari sistem informasi keuangan daerah. Karena pada saat penyusunan laporan keuangan banyak para SKPD yang mengakses sistem informasi ini menyebabkan terhambatnya proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Selain hambatan yang dialami, BPKPD Kota Sukabumi juga terus melakukan pemeliharaan pemeliharaan pada *hardware* dan *software* sistem yang ada di sistem tersebut. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau fungsi dari sistem itu sendiri agar tidak terjadi hambatan – hambatan dalam proses pengelolaan keuangan.

Berikut adalah tampilan aplikasi atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang digunakan oleh SKPD yang ada di Kota Sukabumi untuk proses pengelolaan keuangan:



Gambar 1.7

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi 2022

Proses penyusunan laporan keuangan diperlukan juga strategi untuk mempertahankan opini WTP tersebut dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan, melakukan rekonsiliasi aset dan persediaan dengan perangkat daerah secara terjadwal dan melaksanakan asistensi dalam penyusunan laporan keuangan perangkat daerah. Selain mengelola keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), BPKPD Kota Sukabumi sampai dengan para SKPD terus melaksanakan Bimbingan Teknik (BIMTEK) untuk pengelolaan keuangan. BIMTEK pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan untuk menyusun perencanaan anggaran, pengelolaan, akuntansi, alokasi, administrasi keuangan, membuat laporan keuangan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan untuk pembangunan daerah. Kegiatan BIMTEK juga memiliki tujuan agar kualitas sumber daya manusia dapat terus ditingkatkan.

Selain itu juga Pemerintah Kota Sukabumi senantiasa melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) melalui audit yang terjadwal pada setiap perangkat daerah melalui Inspektorat Kota Sukabumi. Melalui audit yang terjadwal sehingga pada 29 Maret 2022 Pemerintah Kota Sukabumi

meraih penghargaan level 3 maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau yang sering dikenal dengan SPIP.

Maturitas SPIP sendiri merupakan suatu aturan untuk menilai atau mengukur sejauh apa SPIP telah berjalan. Berdasarkan data yang peneliti temukan pada *website* Diskominfo, Kota Sukabumi merupakan satu – satunya daerah di Jawa Barat yang memperoleh predikat tersebut.



Gambar 1.8

Penghargaan Pemerintah Kota Sukabumi maturitas SPIP

Sumber: Diskominfo Kota Sukabumi

Hal itu merupakan bukti bahwa Pemerintah Kota Sukabumi telah melaksanakan SPIP terintegrasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga manfaat dilaksanakannya SPIP adalah Organisasi Perangkat Daerah atau yang sering dikenal dengan OPD pada Pemerintah Kota Sukabumi dapat melaksanakan mitigasi untuk meminimalkan risiko dalam melaksanakan roda organisasi.

D. KESIMPULAN

Proses pengelolaan keuangan tidak terlepas dari peran Inspektorat Kota Sukabumi sebagai reviewer sehingga pada proses review dilaksanakan, reviewer tetap mengacu pada kebijakan akuntansi yang dikeluarkan oleh BPKPD Kota Sukabumi. Mengenai proses transparansi BPKPD Kota

Sukabumi telah melaksanakan sesuai dengan aturan – aturan yang telah ditetapkan.

Pada saat hasil audit di umumkan oleh BPK RI, BPKPD juga mengumumkan di *website* resmi pemerintah Kota Sukabumi dan media cetak seperti RadarSukabumi. Selain pada *website* atau media cetak masyarakat juga dapat mengakses di *website* resmi BPK RI.

Selanjutnya masih dalam bentuk transparansi yang dilakukan, BPKPD juga memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi melalui aplikasi SIRUP.

BPKPD Kota Sukabumi juga memiliki sistem informasi dengan nama sistem Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah Kota Sukabumi.

Selain hambatan yang dialami, BPKPD Kota Sukabumi juga terus melakukan pemeliharaan pemeliharaan pada *hardware* dan *software* sistem yang ada di sistem tersebut. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau fungsi dari sistem itu sendiri agar tidak terjadi hambatan – hambatan dalam proses pengelolaan keuangan.

Proses penyusunan laporan keuangan diperlukan juga strategi untuk mempertahankan opini WTP tersebut dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan, melakukan rekonsiliasi aset dan persediaan dengan perangkat daerah secara terjadwal dan melaksanakan asistensi

Aturan dan Undang – Undang

Undang – undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi

dalam penyusunan laporan keuangan perangkat daerah. Selain mengelola keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), BPKPD Kota Sukabumi sampai dengan para SKPD terus melaksanakan Bimbingan Teknik (BIMTEK) untuk pengelolaan keuangan.

Selain itu juga Pemerintah Kota Sukabumi senantiasa melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) melalui audit yang terjadwal pada setiap perangkat daerah melalui Inspektorat Kota Sukabumi. Selain itu juga manfaat dilaksanakannya SPIP adalah Organisasi Perangkat Daerah atau yang sering dikenal dengan OPD pada Pemerintah Kota Sukabumi dapat melaksanakan mitigasi untuk meminimalkan risiko dalam melaksanakan roda organisasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Creswell, John W. 2010. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saladin, H. Djaslim. 2004. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*: Linda Karya
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Tim dosen ilmu administrasi publik. 2021. *Panduan Ristek, seminar, komperhensif, skripsi dan Publikasi Ilmiah (pada kurikulum MBKM)*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi
- Berbasis Akruar pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber Internet:

Pemerintah Kota Sukabumi raih opini WTP kelima kali:
<https://diskominfo.sukabumikota.go.id/2019/05/29/pemerintah-kota-sukabumikembali-meraih-opini-wtp-untuk-kelima-kalinya-secara-berturut-turut/> (18/11/2021)

Pemerintah Kota Sukabumi raih WTP atas LKPD:
<https://kdp.sukabumikota.go.id/2021/09/pemkot-raih-wtp-atas-laporankeuangan.html> (18/11/2021)

Pemerintah Kota Sukabumi raih OPINI WTP 7 kali berturut – turut:
<https://pelitasukabumi.com/2021/05/21/14051/kota-sukabumi/tahun-2021-pemkot-terima-opini-wtp-tujuh-kali-berturut-turut/> (09/11/2021)

Website BPK RI. Ragam Opini WTP:
<https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk> (19/01/2022)

Pemerintah Kota Sukabumi raih penghargaan level 3 maturitas SPIP:
<https://diskominfo.sukabumikota.go.id/2022/03/30/pemerintah-kotasukabumi-raih-penghargaan-level-3-maturitas-spip/> (25/06/2022)

Transparansi pengelolaan keuangan pada website Pemerintah Kota Sukabumi:
<https://portal.sukabumikota.go.id/category/laporan-keuangan/> (20/06/2022).

Transparansi pengelolaan keuangan pada website BPK RI:
https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan (20/06/2022)
Transparansi pengadaan pada Kota Sukabumi:
<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/penyedia/kld/D104> (20/06/2022)